

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Korea Selatan adalah Negara yang berbentuk republik yang memiliki sistem pemerintahan presidensial yang mana presiden merupakan lembaga tertinggi yang memegang kekuasaan dan seorang presiden bertugas sebagai kepala pemerintahan yang mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditaati. Namun tidak hanya itu pemerintahan Korea Selatan juga ditambah oleh unsur parlementer. Yang mana sistem tersebut memberikan hak istimewa dan perlindungan konstitusi kepada partai politik disamping membebaskan kepada mereka tugas-tugas konstitusional yang tidak digunakan untuk menghalangi tata tertib politik yang bebas dan demokratis.¹

Parlemen atau badan legislatif yang terpilih adalah pilar utama sistem integritas nasional yang berlandaskan tanggung gugat demokrasi. Tugasnya adalah mewujudkan kedaulatan rakyat melalui wakil-wakil yang dipilih, untuk kepentingan publik, memastikan bahwa eksekutif mempertanggung jawabkan tindakannya.

Secara politis di Korea antara Negara dan rakyat sudah ada konsensus nasional untuk menuju demokrasi yang liberal dan menerapkan sistem persaingan secara bebas dalam bidang ekonomi. Sehingga masalah-masalah dasar kehidupan politik Korea didasarkan pada kedua konsensus yang terjalin antar Negara,

¹ **BRIC (Badan Riset dan Informasi Korea) - Kebijakan Korea Selatan**, 2013, hal. 1000

pemerintahan dan rakyat tersebut. Namun demokrasi Korea masih dikatakan dangkal. Ini ditandai dengan tidak konsistennya pelaksanaan politik yang berdasarkan konstitusi. Hal ini menyebabkan politik Korea menjadi tidak stabil. Demokrasi di Korea dimulai pada tahun 1945 yang merupakan adopsi dari barat bukan dari pemikiran, kebiasaan dan tradisi asli bangsa Korea.

Pemerintahan Korea Selatan adalah pemerintahan oleh rakyat, dalam artian baik anggota eksekutif dan legislatif Korea dipilih oleh rakyat. Dalam sistem pemerintahan Korea terdapat tiga badan Negara yaitu badan eksekutif, Legislatif, dan yudikatif. Namun di Korea badan Eksekutif mempunyai wewenang yang jauh lebih besar daripada kedua badan yang lain, dan bagi rakyat umum, pegawai pemerintahan (Eksekutif) dianggap mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan pegawai legislatif dan yudikatif. Hal ini dikarenakan pada masa kerajaan para pegawai kerajaan yang sekarang disebut sebagai eksekutif merupakan penengah yang menghubungkan antara raja dan rakyat, sehingga sekarang badan eksekutif secara langsung menguasai segenap rakyat sebagai pengganti raja.

Sehingga badan eksekutif cenderung mempunyai peran lebih besar dibanding kedua badan lainnya. Besarnya peran badan eksekutif ini menyebabkan badan legislatif dan yudikatif tidak dapat secara efisien mengontrol sepak terjang badan eksekutif. Pendek kata kedudukan ketiga badan itu tidak seimbang dan belum berfungsi secara efisien untuk saling mengontrol satu sama lain.² sehingga ketimpangan posisi selalu terjadi dalam pemerintahan Korea Selatan. Ini yang

²

menyebabkan kedudukan antara ketiga badan itu menjadi tidak berada pada proporsinya.

Presiden Republik Korea dipilih oleh rakyat melalui pemilihan suara yang berlangsung secara nasional, sederajat, langsung dan rahasia, yang berada di puncak cabang eksekutif.³ Namun parlemen punya hak untuk menghentikan presiden dari jabatannya dengan syarat disetujui oleh dua pertiga dari anggota parlemen, apabila presiden tersebut melakukan suatu kesalahan yang fatal dan dapat merugikan Negara dan menjatuhkan citra dirinya sebagai Presiden Korea.

Presiden menjabat selama lima tahun dalam periode pertama, dan tidak diizinkan mendapat tambahan waktu. Ketetapan ini merupakan suatu usaha perlindungan yang dilakukan guna mencegah seseorang memegang kendali kekuasaan pemerintahan untuk periode waktu yang panjang sehingga sampai menjabat dalam beberapa periode.

Pada tanggal 19 Desember 2002 lalu Korea mengadakan pemilihan untuk memilih presiden secara langsung yang dimenangkan oleh Roh Moo Hyun. Dan pada tanggal 25 Februari 2003, Roh Moo Hyun secara resmi dilantik sebagai presiden Republik Korea (RoK) ke-16. Roh merupakan presiden keempat yang dipilih secara langsung oleh masyarakat Korea.⁴ Salah satu kunci utama kemenangan Roh ini antara lain dengan janji-janji yang menyangkut hubungan dan kelangsungan kerjasama rekonsiliasi inter-Korea termasuk penyelesaian masalah nuklir Republik Demokrasi Rakyat Korea (RDRK) secara damai. Roh

³ PBIK (Pelayanan Badan Informasi Korea). *Fakta tentang Korea*. Grafika Indah, Jakarta, 2003. hal 33

⁴ *Chang Ahn, Kim Il-Sung dan Kim Jong-Il: Korea Utara dan Internasional*, 1996, hal 1

mengupayakan penyelesaian secara dialog dengan Korea Utara. Kemudian sikap anti-Amerika Roh juga salah satu isu yang digunakan Roh pada saat kampanye presiden.

Roh yang berasal dari partai liberal (Partai Demokratik Liberal) partai besar kedua menang tipis atas saingannya Lee Hoi Chang yang merupakan saingan terberat dari partai Konservatif (Partai Agung Nasional) yang berasal dari partai oposisi terbesar di Korea, dengan perolehan suara 48,9 persen suara melawan 46,6 persen dari 99,91 persen suara yang masuk ke komisi pemilihan umum Korea Selatan.⁵

Pemerintahan Roh ini lahir oleh adanya kekuatan rakyat yang ditandai dengan adanya Pengumpulan uang secara sukarela dan kampanye pemilu oleh rakyat yang menghargai prinsip-prinsip dan akal sehat berhasil membawa kemenangan Roh dalam pemilihan presiden, yang pertama dan yang terpenting pemerintahan Roh dibentuk berdasarkan pada kekuasaan partisipasi rakyat sehingga pemerintahan Roh ini disebut "pemerintahan Partisipasi" yang menetapkan tiga sasaran: "berdemokrasi bersama rakyat", "masyarakat dengan pertumbuhan seimbang," dan "Era perdamaian dan kemakmuran di kawasan Asia Timur laut"⁶

Namun memasuki tahun kedua pemerintahan Roh tidak berjalan mulus, sebagian besar anggota parlemen yang didominasi oleh oposan memaksa Roh turun dari kursi kepresidenannya. Mayoritas anggota parlemen mengajukan *Impeachment* terhadap presiden Roh dan Pada tanggal 12 Maret 2004 anggota

⁵ <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1202/20/0109.htm> pikiran rakyat. "Menang Tipis Atas Tokoh Konservatif, Lee Hoi-Chang, Roh, Presiden Baru Korsel" Juni at 20 Desember 2002, diakses 23 juni 2006.

⁶ <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1202/20/0109.htm> pikiran rakyat. "Menang Tipis Atas Tokoh Konservatif, Lee Hoi-Chang, Roh, Presiden Baru Korsel" Juni at 20 Desember 2002, diakses 23 juni 2006.

parlemen yang mengajukan mosi tidak percaya⁷ kepada parlemen telah disetujui. Maka pada hari itu pula *impeachment* terhadap Roh diberlakukan. Sebagian anggota parlemen yang mengajukan *Impeachment* ini merasa bahwa presiden Roh tidak berhasil menjalankan tugas-tugas sebagai presiden.

Dengan disetujuinya pengajuan *Impeachment* terhadap Roh dengan putusan mayoritas 197 dari 273 anggota parlemen,⁸ maka pada tanggal 12 Maret 2004 Roh diturunkan dari jabatannya, kemudian segala tugas dan tanggung jawabnya sebagai presiden ditangguhkan kepada PM Goh Kun sebagai kepala Negara ad-interim sementara sampai Mahkamah Konstitusi memutuskan setuju atau menolak *Impeachment* terhadap presiden Roh.

Padahal selama ini Presiden Roh dikenal lebih dekat dengan rakyat dan dahulunya juga Roh adalah seorang pengacara HAM yang banyak membantu orang-orang kecil dan mahasiswa, sehingga ini merupakan salah satu nilai plus untuk Roh karena dia lebih mengetahui kesulitan-kesulitan rakyat kecil. Sehingga Muncul satu pertanyaan besar mengapa sebagian anggota parlemen mengajukan *Impeachment* terhadap Roh.

Parlemen punya kekuasaan untuk meng-impeach presiden apabila presiden atau pejabat public lainnya melakukan pelanggaran yang sesuai dengan hukum Korea. pengajuan *Impeachment* ini merupakan suatu kekuasaan yang dimiliki

⁷ Mosi tidak percaya adalah pernyataan DPR yang mengharapkan Kepala Pemerintahan mengundurkan diri dan membubarkan kabinetnya karena tidak mendapat dukungan suara terbanyak lagi dari DPR. Cara ini biasanya dianut oleh Negara yang melaksanakan demokrasi parlementer.

oleh parlemen dengan pengajuan dari masyarakat karena mereka merasa bahwa pemimpin mereka menyimpang dari jalur konstitusi Korea. namun pengajuan *impeachment* ini berlaku apabila dua pertiga dari anggota parlemen menyetujui atas pengajuan usul *impeachment* tersebut.

Namun setelah dua bulan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memproses *Impeachment* tersebut, tepatnya pada tanggal 14 mei 2004 Mahkamah Konstitusi secara resmi mencabut mosi pemberlakuan *Impeachment* Presiden Roh Moo Hyun yang diajukan oleh mayoritas anggota parlemen itu.⁹ hal ini membuktikan bahwa mayoritas parlemen tidak punya alasan yang kuat untuk menjatuhkan Roh. dan masyarakat Korea masih menginginkan Roh menjadi presiden Korea sampai berakhir masa jabatannya.

B. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan penjelasan diatas maka pokok permasalahan yang akan diteliti penulis adalah: Faktor-Faktor apa yang melatar belakangi mayoritas anggota parlemen melakukan *impeachment* terhadap presiden Roh Moo Hyun?

C. KERANGKA DASAR PEMIKIRAN

Pengetahuan yang diperoleh dengan pendekatan ilmiah diperoleh melalui penelitian ilmiah dan dibangun diatas teori atau konsep tertentu yang berkembang melalui penelitian ilmiah, yaitu penelitian yang sistematis dan terkontrol berdasarkan data empiris yang dapat diuji kemantapan internalnya. Pendekatan

⁹ <http://Korea.na.go.kr/vha/new-read.jsp?boardid=1000000025&boarditemid=1000004597>

mahkamah konstitusi memutuskan mosi Pak diakui 27 juni 2006

ilmiah akan menghasilkan kesimpulan yang serupa bagi setiap orang, karena penyimpulannya secara objektif.

Untuk menjelaskan permasalahan diatas, maka digunakan beberapa kerangka teoritik atau konsep sebagai acuan. Konsep adalah ide yang diabstraksikan melalui peristiwa konkrit.¹⁰ Untuk meneliti masalah ini konsep yang digunakan adalah **Konsep *Impeachment* dan Konsep Kepentingan Partai Politik.**

a) Konsep *Impeachment*

Impeachment merupakan pemberhentian yang dilakukan terhadap presiden dimana belum habis masa jabatannya.¹¹ Pada umumnya Negara demokrasi yang memiliki badan Parlemen berfungsi sebagai wakil rakyat yang bertugas untuk memproses tuntutan dari rakyatnya, misalnya mosi tidak percaya yang diajukan oleh rakyat yang disebabkan hilangnya legitimasi rakyat terhadap pemimpin saat itu. *Impeachment* ini dilakukan bila masyarakat yang melalui para wakilnya di DPR tidak menyukai presiden sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut. Seperti yang terjadi di Korea Selatan pada Maret 2004, mayoritas anggota parlemen Korea mengajukan *impeachment* terhadap presiden Roh Moo Hyun yang disetujui oleh sebagian besar atau sepertiga anggota Parlemen yang berasal dari partai oposisi (GNP) dan MDP partai asal Roh.

Impeachment ini merupakan tindakan yang menuduh seorang pejabat negara atau politisi yang dianggap melakukan kejahatan serius, khususnya

¹⁰ B.N Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003.

¹¹ *Banking, Cipta, Politik & Demokrasi*, Lembaga Kebijakan Moneter, 2003, 11-12

seseorang yang menentang atau melanggar hukum yang diatur negara. *Impeachment* ini pertama kali dipraktekkan di Inggris, kemudian pada tahun 1868 Andrew Johnson didakwa karena melakukan pelanggaran hukum dan banyak lainnya. *Impeachment* merupakan suatu hal yang menakutkan bagi para eksekutif karena jika seorang telah dijatuhi *impeachment* maka *impeachment* itu dapat menghentikan karir politik mereka.

Impeachment juga merupakan sebuah kontrol pejabat tinggi dan presiden agar tidak melakukan kesalahan yang dapat memalukan Negara dan menurunkan citra dirinya sebagai seorang pemimpin Negara. Dalam konstitusi Korea Selatan *Impeachment* diatur pada pasal 65 ayat 1 (satu) tentang *Impeachment*:

*"In case the President, the Prime Minister, member of the State Council, heads of Executive ministries, judges of constitutional Court, judges, members of the central election management committee, members of board of Audit and Inspection, and other public officials designated by law have violated the constitution or others law in the performance of official duties, the National Assembly may pass motions for their impeachment".*¹²

Dalam hal ini Presiden, Perdana Menteri, Anggota Dewan Negara, Kepala Eksekutif Menteri, Mahkamah Konstitusi, Anggota Panitia pengurus pemilihan pusat, anggota panitia audit dan pengawas, dan pejabat umum resmi lainnya yang berkaitan dengan hukum yang dengan sengaja melakukan kejahatan yang berkaitan dengan konsitusi atau hukum lain dalam menjalankan pekerjaan resmi maka National Assembly boleh mengajukan *Impeachment* terhadap mereka.

Permasalahan seputar kasus *Impeachment* terhadap Presiden Korea Selatan ke-16 Roh Moo Hyun sempat menarik perhatian percaturan politik Korea Selatan

dan mengundang banyak protes dari pendukung dan masyarakat Korea Selatan. Dalam permasalahan *impeachment* ini parlemen terlalu terburu-buru untuk menurunkan Roh Moo Hyun dari kursi presiden. Sehingga alasan yang digunakan terlalu mengada-ada dan kurang masuk akal. Yang dapat menimbulkan banyak spekulasi dalam masyarakat dan politik Korea bahwa parlemen telah melakukan penindasan terhadap demokrasi Korea.

b) Konsep Kepentingan Partai Politik

Konsep Kepentingan Partai Politik. kalau kita melihat keinginan para oposan untuk meng-*impeach* presiden Roh lebih didasari keinginan untuk menguasai jabatan yang lebih tinggi, yakni adanya kepentingan dari suatu kelompok yang bertujuan untuk memperoleh apa yang dicita-citakan bersama, untuk menganalisa fenomena tersebut alangkah baiknya kita memahami tentang partai politik. Menurut Sigmund Neumann dalam buku *Modern Political Parties* bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan yang lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.¹³ Keinginan untuk memperoleh kedudukan tertinggi merupakan impian banyak orang agar bisa mengendalikan segalanya sesuai keinginannya melalui power dan otoritas yang ia peroleh dari kedudukan itu sehingga berbagai cara dilakukan untuk memperoleh tujuan itu.

Keinginan Partai Nasional Agung (GNP) untuk menjatuhkan Presiden Roh dari kursi kepresidenannya didasari atas keinginan untuk menguasai kedudukan atau kursi kekuasaan yang hampir mereka peroleh pada pemilihan presiden 2002 lalu, dan mereka juga menganggap bahwa Roh merupakan ancaman bagi kepentingan mereka yang lain. Sebagai contoh Roh merupakan orang yang berseberangan dengan para *chaebol* sementara GNP adalah partai yang selalu mendapat dukungan besar dari para *chaebol* itu, sehingga mereka merasa tidak aman dan tidak punya kekuatan yang besar seandainya Roh berlama-lama berada di posisi itu. Maka dari itu mereka mencoba menjatuhkan Roh dengan cara *meng-impeach*.

Dengan alasan pelanggaran Undang-undang Pemilu yang dilakukan Roh karena melanggar prinsip netralitas pemilu yang mengatakan bahwa presiden ataupun pejabat publik lainnya tidak dibenarkan memihak salah satu partai menjelang pemilihan umum. Dalam website English people daily dipaparkan pernyataan Roh Moo Hyun saat mendukung Partai Uri "The move follows a finding last week by the national Election Committee that Mr. Roh breached election rules by calling for *"overwhelming support" for the tiny Uri Party, which backs the president, ahead of next month's polls*".¹⁴

¹⁴ http://english.peopledaily.com.cn/200310/11/eng20031011_125700.html#size=20

Pernyataan presiden Roh ini ditujukan untuk Partai kecil Uri yang merupakan partai yang beranggotakan dari anggota partai-partai besar seperti GNP yang membelot karena tidak memiliki pandangan yang sama tentang politik. dukungan yang diberikan oleh Presiden Roh berbentuk semacam kampanye untuk mendukung Partai Uri. kemudian ketidak sanggupannya Roh menjadi seorang pemimpin dilihat dari penurunan perekonomian Korea sejak Roh menjabat sebagai presiden turun sekitar 3,1% pada tahun 2003 padahal pada tahun 2002 perekonomian Korea berada pada 6,1%, dengan penurunan ekonomi ini maka secara otomatis pengangguran Korea naik menjadi 2,7% yang pada tahun 2002 berada pada angka 2,5% dan yang terakhir penggunaan dana ilegal yang diduga diterima oleh orang-orang dekat Roh pada pemilu 2002, ketiga alasan inilah yang digunakan oleh mayoritas anggota parlemen sebagai wajah untuk meng-*impeach* Roh demi mencapai kepentingan partai politik mereka.

Secara politik saya melihat bahwa adanya persaingan yang sangat besar diantara partai oposisi yang ditandai dengan keinginan partai oposisi (GNP) untuk menduduki kursi kepresidenan agar mereka memperoleh kekuatan yang lebih besar dalam parlemen sehingga setiap kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah akan lebih mudah untuk disetujui tanpa adanya suara yang berseberangan dengan mereka. dan MDP partai yang mendukung Roh pada saat pemilu presiden tahun 2002 merasa marah karena secara sosial Roh Moo Hyun dianggap mengkhianati partai Democratic Millenium (MDP) yaitu partai yang menantarkan Roh Moo Hyun menjadi Presiden Korea Selatan. Sehingga pada

saat *impeachment* yang ditujukan terhadap Roh Moo Hyun anggota parlemen dari partai MDP memberikan suara terhadap tuntutan itu.

Pengajuan *impeachment* ini dilakukan lebih mengarah pada tujuan oposisi agar Roh turun dari kursi kepresidenan dan menyerahkan kursi kepresidenan itu kepada oposisi yang memiliki suara lebih besar dalam parlemen, jika nantinya digunakan sistem voting dalam parlemen.

D. HIPOTESA

Berdasarkan permasalahan yang ada, kemudian didukung oleh kerangka pemikiran yang relevan, maka peneliti mengambil kesimpulan yaitu: parlemen yang didominasi oleh anggota partai oposisi melakukan *impeachment* terhadap Roh Moo Hyun karena Mayoritas anggota parlemen ingin mengambil alih kursi presiden (menguasai kursi presiden) yang hampir saja mereka peroleh pada pemilu presiden 2002 dengan tujuan agar bisa menyempurnakan kekuasaan mereka dalam parlemen. dengan cara mengajukan *impeachment* dengan menggunakan pelanggaran Undang-undang pemilu yang dilakukan presiden Roh menjelang pemilu parlemen, ketidak cakapan Roh memimpin yang diukur dari penurunan perekonomian Korea dan menerima dana ilegal pada pemilu 2002 lalu

E. METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan bahan-bahan pustaka seperti buku, jurnal, dan sumber-sumber data lain seperti surat kabar, dan majalah yang dianggap relevan. Data yang diperoleh nantinya akan dianalisa dengan menggunakan kerangka dasar teori atau konsep yang telah ditetapkan.

F. JANGKAUAN PENELITIAN

Untuk menghindari pelebaran pembahasan dan agar lebih memfokuskan pembahasan penelitian ini maka dibutuhkan batasan waktu pembahasan, yaitu dimulai tahun 2002 dimana mulai terpilihnya Roh Moo Hyun menjadi presiden sampai dijatuhkannya *impeachment* tersebut yakni tahun 2004. namun tidak menutup kemungkinan untuk mengulas hal - hal atau kejadian sebelumnya yang masih berkaitan dengan masalah yang diteliti.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dari penulisan ini disusun dalam lima bab dengan berbagai sub topik pembahasan.

BAB I membahas tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teori, hipotesa, metode pengumpulan data, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II ini akan membahas tentang sistem pemilu, partai politik Korea dan pemilihan presiden Korea.

BAB III dalam bab ini akan membahas tentang Kedudukan dan fungsi parlemen (DPR) dan hubungannya dengan Presiden.

BAB IV dalam bab ini akan membahas tentang faktor faktor yang menyebabkan Roh Moo Hyun di impeachment.

BAB V merupakan kesimpulan dari penelitian ini.